



Pendampingan kader pembangunan manusia (KPM) dalam pembuatan proposal kegiatan konvergensi pencegahan *stunting*

Kadar Ramadhan¹✉, Fransisca Noya¹, Aminuddin Aminuddin¹, Setiawan Setiawan²

¹ Poltekkes Kemenkes Palu, Prodi D-III Kebidanan Poso, Poso, Indonesia

² Poltekkes Kemenkes Surabaya, Surabaya, Indonesia

✉ kadarlaure@gmail.com

 <https://doi.org/10.31603/ce.4558>

Abstrak

Masih tingginya prevalensi *stunting* mendorong pemerintah untuk melakukan usaha pencegahan. Salah satunya adalah program prioritas konvergensi pencegahan *stunting* di desa melalui Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa 2020. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk melakukan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* dengan 1 kader 1 desa. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya pembekalan kegiatan konvergensi bagi KPM. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada KPM dalam pembuatan proposal kegiatan konvergensi. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso pada bulan Februari 2020. Khalayak sasarannya adalah 13 orang KPM dan 13 bidan desa. Dalam kegiatan pendampingan KPM ini, kader dan bidan desa berhasil membuat proposal kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di desa. Diharapkan bagi pemerintah desa untuk menindaklanjuti proposal kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* ini ke dalam musyawarah desa dan disepakati untuk dianggarkan untuk tahun 2021.

Kata Kunci: *Stunting*; Kader pembangunan manusia; Bidan desa; Konvergensi

Assistance of human development cadres in making proposals for convergence prevention of stunting activities

Abstract

The high prevalence of *stunting* has prompted the government to take preventive measures. One of them is the priority program for convergence to prevent *stunting* in villages through the Ministry of Village Regulation, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration Number 11 of 2019 concerning Priority for the Use of Village Funds 2020. This regulation was followed up by the formation of a Human Development Cadre (KPM) to carry out convergence activities for preventing *stunting* with 1 cadre of 1 village. The problem that occurs is the lack of provision for convergence activities for KPM. This community service activity aims to provide assistance to KPM in making proposals for convergence activities. This activity was carried out in Poso Pesisir District, Poso Regency in February 2020. The target audience was 13 KPM people and 13 village midwives. In this KPM mentoring activity, village cadres and midwives succeeded in making proposals for convergence activities to prevent *stunting* in the village. It is hoped that the village government will follow up the proposals for convergence activities to prevent *stunting* into village meetings and it is agreed to be budgeted for 2021.

Keywords: *Stunting*; Human development cadres; Village midwives; Convergence

1. Pendahuluan

Stunting masih menjadi masalah serius yang menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk diselesaikan. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan balita yang mengalami *stunting* mencapai 30.8%. Artinya, sebanyak 7 juta calon generasi bangsa terancam kurang memiliki daya saing dimasa mendatang. Penurunan angka *stunting* di Indonesia selama 10 tahun terakhir belum menunjukkan adanya perubahan yang berarti (Kementerian Kesehatan R.I, 2018b).

Prevalensi *stunting* di Sulawesi Tengah mengalami penurunan. Data Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi *stunting* 41% turun menjadi 32.3% pada tahun 2018 (Kementerian Kesehatan R.I, 2013, 2018b). Adapun data survei Pemantauan Status Gizi (PSG), tahun 2016 prevalensi *stunting* sebesar 32% dan tahun 2017 naik menjadi 36.1% (Kementerian Kesehatan R.I, 2017, 2018a). Untuk prevalensi *stunting* anak di bawah 2 tahun mengalami penurunan sebesar 6.2% dalam kurun waktu 9 tahun dari tahun 2007 ke tahun 2016, atau rata-rata mengalami penurunan 0.6% per tahun (Nasrul dkk., 2017).

Prevalensi *stunting* di Kabupaten Poso mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 39.4% menjadi 26.2% pada tahun 2018. Poso menjadi kabupaten posisi ke-3 terendah prevalensi *stunting* setelah Kota Palu dan Kab. Tojo Una-una (Kementerian Kesehatan R.I, 2013, 2018b). Puskesmas Mapane berada dalam wilayah Kecamatan Poso Pesisir yang membawahi 10 Kelurahan/Desa. Berdasarkan hasil posyandu Oktober 2019, prevalensi *stunting* di wilayah Puskesmas Mapane sebesar 29.6% dengan prevalensi tertinggi di Desa Toini sebesar 43.8% dan prevalensi terendah di Desa Lanto Jaya sebesar 20.9% (Tim Pelaksana Gizi Puskesmas Mapane, 2019)

Walaupun prevalensi *stunting* cenderung turun, namun angka tersebut masih di atas standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu di bawah 20% (de Onis dkk., 2019; World Health Organization, 2018). Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi lewat Permendes No. 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa 2020 memasukkan *stunting* sebagai program prioritas untuk segera diselesaikan melalui kegiatan konvergensi pencegahan *stunting*. Dengan mengalokasikan dana desa untuk melaksanakan kegiatan konvergensi dengan harapan bisa mencegah dan menurunkan prevalensi *stunting* (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2019)

Tindak lanjut dari upaya pencegahan *stunting* secara terkonvergensi adalah pembentukan KPM di setiap desa. Tenaga pendamping masyarakat Desa bersama-sama dengan KPM memfasilitasi pemerintahan dan masyarakat desa mencegah *stunting* di desa. Konvergensi pencegahan *stunting* dapat mengisi ruang kosong intervensi yang telah dilakukan. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan untuk memastikan konsumsi asupan gizi, keterjangkauan layanan, serta terbangunnya tanggung jawab bersama atas permasalahan *stunting* di Desa. Partisipasi masyarakat dapat membuka ruang peningkatan kapasitas kader desa dan lembaga penyedia layanan di desa untuk mendorong keberlanjutan gerakan pencegahan *stunting* melalui rencana aksi, regulasi dan dukungan pendanaan Desa, serta memastikan kesiapan pemerintahan Desa dalam mengawal konvergensi pencegahan *stunting* bersama seluruh *stakeholder* terkait (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2018).

Kader kesehatan di desa yang dapat berkolaborasi dengan bidan desa harusnya dapat menjadi motor penggerak dalam mengurangi masalah kesehatan khususnya *stunting*. Kader kesehatan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan, namun tidak mendapat bekal pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Di sisi lain penghargaan secara materi yang diperoleh juga sangat minimal yang dapat menghambat kinerja dan kesejahteraan kader (Purwati dkk., 2018; Sari dkk., 2017). KPM yang memiliki tugas besar dalam penurunan *stunting* belum dibekali dengan baik. Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah hanya 1 kali tentu belum maksimal. Oleh karena itu kami melaksanakan kegiatan PkM dengan melakukan pendampingan KPM dalam konvergensi pencegahan *stunting*. Tujuannya untuk mendampingi KPM dan bidan desa dalam menyusuk kegiatan konvergensi di desa.

2. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah *Focus Groups Discussion* (FGD). Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 27 – 28 Februari 2020 bertempat di Kantor Camat Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini terbagi atas 2, yaitu, Kegiatan FGD Pencegahan *Stunting* dengan peserta adalah Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan bidan desa serta para kepala desa dan perwakilan puskesmas Mapane, dan kegiatan penyusunan proposal kegiatan konvergensi dengan peserta hanya KPM dan bidan desa.

Kegiatan hari pertama menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Poso (dr. Marwan Neno, M.Kes, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) (Ridwan Bempah, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa), dan Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Poso (Rahmaningsih, S.T.).

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini diawali dengan laporan ketua tim pelaksana PkM, Kadar Ramadhan (Gambar 1), dilanjutkan dengan sambutan oleh Camat Poso Pesisir, Indra W. Ngasang, S.Pt., M.Si sekaligus membuka secara resmi kegiatan PkM “*Pendampingan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa*”.



Gambar 1. Penyampaian ketua tim pelaksana pengabmas

Pada kegiatan hari pertama turut diundang para kepala desa se-Kecamatan Poso Pesisir, Pengelola Gizi Puskesmas Mapane, dan Pendamping Desa sebagai pihak yang terkait dengan kegiatan konvergensi di desa.

3.1. Kegiatan FGD Pencegahan *Stunting*

Kegiatan ini diawali dengan pemaparan tentang situasi terkini *stunting* di Kabupaten Poso serta upaya yang telah dilakukan untuk mencegah *stunting* oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Poso. Disampaikan pula tentang keberhasilan dalam menurunkan angka *stunting*, dari 39.4% pada tahun 2013, menjadi 26.2% tahun 2018.

Paparan kedua mengenai peran pemerintah desa dalam pencegahan *stunting* disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Poso. Dukungan penggunaan dana desa untuk kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* perlu disosialisasikan kepada seluruh pemerintah desa untuk menyukseskan program nasional pencegahan *stunting* ini.

Paparan ketiga mengenai perencanaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di desa, disampaikan oleh Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Poso. Pada materi ini disampaikan penekanan kepada pemerintah desa untuk menganggarkan dalam APBDes kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* menggunakan dana desa.

Pada sesi diskusi ([Gambar 2](#)), beberapa kepala desa menanyakan mengenai payung hukum kegiatan konvergensi ini. Sebelumnya mereka mengaku masih takut untuk menganggarkan kegiatan yang belum ada “kode akun” dalam aplikasi penyusunan APBDes. Ada juga kepala desa yang mengaku belum memiliki petunjuk teknis mengenai kegiatan konvergensi ini. Semua pertanyaan dijawab dengan baik oleh para narasumber dan kepala desa mendapatkan penjelasan yang lebih jelas lagi terkait kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di desa. Pada akhir kegiatan, mereka berkomitmen untuk menganggarkan kegiatan konvergensi ini untuk tahun 2020. Namun, pada akhirnya tidak terlaksana akibat adanya pandemik Covid-19. Sebagian besar dana desa dialokasikan untuk pencegahan Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) masyarakat yang tidak mampu.



Gambar 2. Para kepala desa di Kecamatan Poso Pesisir yang turut hadir

3.2. Kegiatan Penyusunan Proposal Kegiatan Konvergensi

Setelah FGD, dilanjutkan dengan penyusunan proposal kegiatan konvergensi. Pesertanya adalah kader KPM dan bidan desa. Dalam kegiatan ini dibuat kelompok-kelompok diskusi kecil ([Gambar 3](#)). Kegiatan ini dipandu oleh Ibu Fransisca Noya dan mahasiswa terlibat membantu pada tiap kelompok. Pada akhir kegiatan, seluruh KPM dan bidan desa berhasil membuat proposal kegiatan konvergensi.



Gambar 3. Diskusi penyusunan rencana kegiatan konvergensi di desa

Dalam penyusunan proposal kegiatan konvergensi, ada 3 hal pokok yang wajib ada, yaitu gambaran besar masalah *stunting*, rencana kegiatan yang akan dilakukan, dan rencana anggaran belanja (RAB). Untuk mengetahui gambaran masalah *stunting* di desa diperoleh pada pengelola gizi Puskesmas Mapane. Seluruh data penimbangan di setiap posyandu tiap bulannya di-*input* ke dalam aplikasi e-PPGBM sehingga data prevalensi *stunting* tersedia. Untuk rencana kegiatan konvergensi berpedoman pada Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan *Stunting* di Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2018), sedangkan penyusunan RAB kegiatan konvergensi berpedoman kepada Standar Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

KPM dan bidan desa harus bekerja sama dalam penyusunan proposal ini karena mereka sebagai “pemeran utama” dalam kegiatan konvergensi di desa. KPM sebagai penanggung jawab dan bidan desa sebagai mitra utama harus bersinergi dengan pemerintah desa agar usulan yang disampaikan dapat dibahas dalam forum tertinggi di desa yaitu musyawarah desa (Kominfo Bolmong, 2019).

4. Kesimpulan

Dalam kegiatan pendampingan KPM ini, kader dan bidan desa berhasil membuat proposal kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di desa. Diharapkan bagi pemerintah desa untuk menindaklanjuti proposal kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* ini ke dalam musyawarah desa, dibahas dan disepakati untuk dianggarkan untuk tahun 2021.

Acknowledgement

Kami mengucapkan terima kasih kepada Camat Poso Pesisir yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

de Onis, M., Borghi, E., Arimond, M., Webb, P., Croft, T., Saha, K., De-Regil, L. M., Thuita, F., Heidkamp, R., Krusevec, J., Hayashi, C., & Flores-Ayala, R. (2019). Prevalence Thresholds for Wasting, Overweight and Stunting in Children Under 5 Years. *Public Health Nutrition*, 22(1), 175–179. <https://doi.org/10.1017/S1368980018002434>

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2018). *Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa*. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2019). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kementerian Kesehatan R.I. (2013). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I.
- Kementerian Kesehatan R.I. (2017). *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016*. Direktorat Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan R.I. (2018a). *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017*. Direktorat Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan R.I. (2018b). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2018*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I.
- Kominfo Bolmong. (2019, Oktober 1). Pencegahan Stunting Dianggarkan Dana Desa Tahun 2020. *Pemkab Bolmong*. <https://news.bolmongkab.go.id/pencegahan-stunting-dianggarkan-dana-desa-tahun-2020/>
- Nasrul, Maudu, R., & Hafid, F. (2017). Trend and Prevalence of Stunting In Children Under Two Years From 2007-2016 In Central Sulawesi. *Preventif Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 73-78.
- Purwati, Y., Salmiyati, S., & Imallah, R. N. (2018). Pendampingan Kader Kesehatan dalam Strategi Produksi dan Promosi MP-ASI. *Abdimas Dewantara*, 1(2), 96-108.
- Sari, Y. P., Sujana, T., & Nugroho, K. P. A. (2017). Implementasi Aktivitas Program Peningkatan Gizi di Posyandu Dusun Gondang, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 109-115. <https://doi.org/10.34035/jk.v8i2.227>
- Tim Pelaksana Gizi Puskesmas Mapane. (2019). *Laporan Status Gizi Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Mapane Oktober 2019*. Puskesmas Mapane.
- World Health Organization. (2018). *WHA Global Nutrition Targets 2025: Stunting Policy Brief*. World Health Organization. https://www.who.int/nutrition/topics/globaltargets_stunting_policybrief.pdf



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License